



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**UNIT KERJA** : KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GATUT SUGIARTO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
3. NHK : 756398

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.830.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 2.371 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/180 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 75.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/139 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 80.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 886 m2/200 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 3.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3E MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>D. SURAT BERTAHAPAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.517.419</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.992.517.419</b>



III. HUTANG

Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.917.517.419

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.